



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMIN NUR
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 732656

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.780.000.000

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 363.500.000

1. MOTOR, HONDA HONDA XIH02N35M1 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV RS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 143.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 974.114.684

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.260.614.684

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.260.614.684

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD THAMRIN
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 629809

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.380.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/110 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/45 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. Tanah Seluas 12.369 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA V LUXURY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 117.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.898.676

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.797.898.676

III. HUTANG Rp. 180.096.842

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.617.801.834

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UDI HERDADI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 157799

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **530.000.000**

1. Tanah Seluas 459 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000
2. Tanah Seluas 211 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 165.000.000
3. Tanah Seluas 2.028 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **102.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N452L1 A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **2.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **62.535.259**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **60.000.000**

Sub Total **Rp.** **756.535.259**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **756.535.259**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDI SARIFUDIN
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 629829

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 812.040.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/130 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI , Rp. 812.040.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 131.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI ATLIT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FREE GO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, YAMAHA FAZIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.771.328

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 960.811.328

III. HUTANG Rp. 60.951.253

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 899.860.075

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.